

**TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI PERBANDINGAN
INDONESIA DAN VIETNAM)**

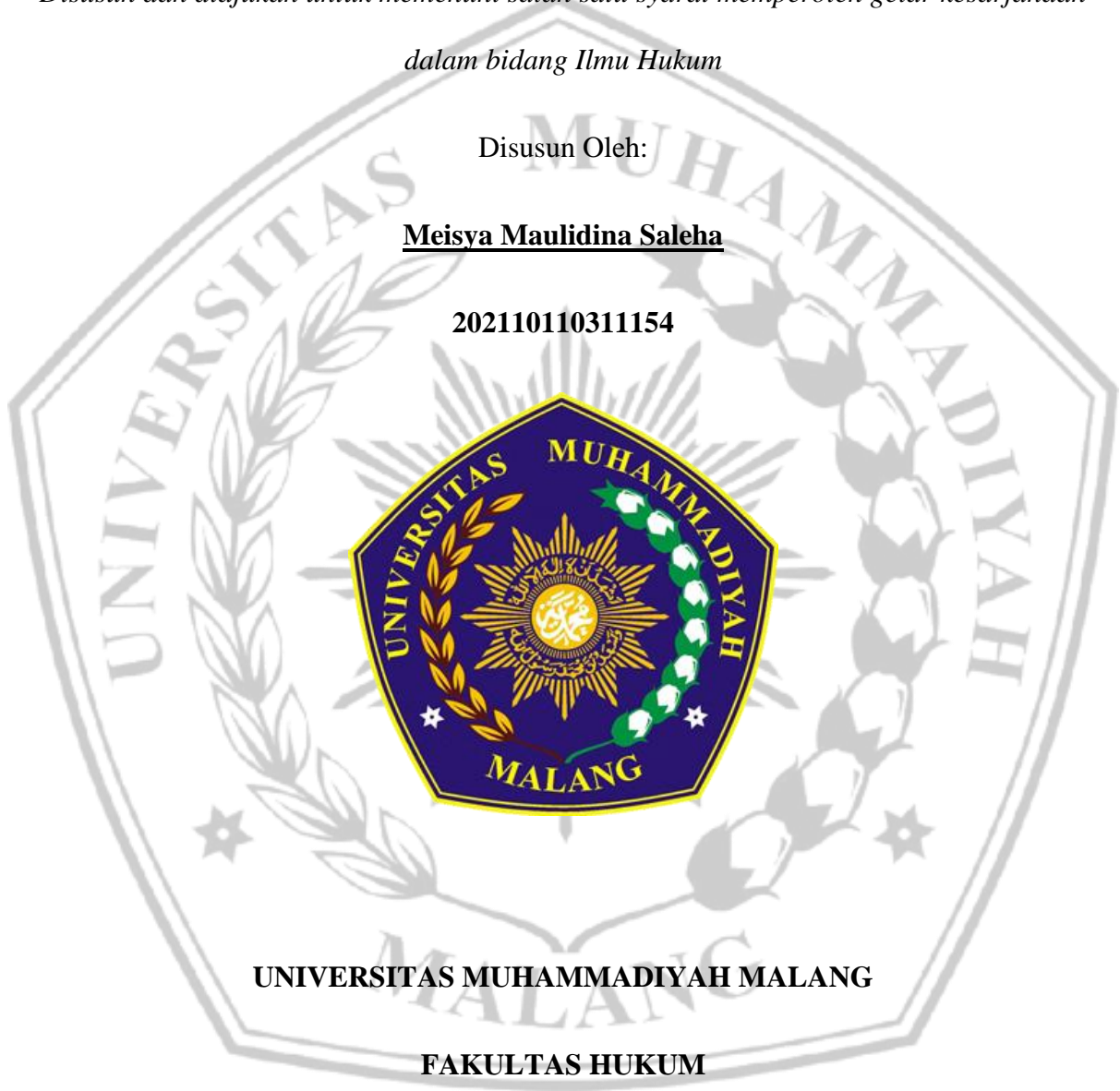
SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Disusun Oleh:

Meisya Maulidina Saleha

202110110311154



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI PERBANDINGAN
INDONESIA DAN VIETNAM)**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*



Disusun Oleh:

MEISYA MAULIDINA SALEHA

NIM: 202110110311154

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI
PERBANDINGAN INDONESIA DAN VIETNAM)**

Diajukan Oleh:

MEISYA MAULIDINA SALEHA

202110110311154

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Oktober 2025

Pembimbing Utama,

Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



Dekan,

Prof. Dr. Fongar, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MEISYA MAULIDINA SALEHA

202110110311154

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MEISYA MAULIDINA SALEHA

NIM : 202110110311154

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI
PERBANDINGAN INDONESIA DAN VIETNAM)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 15 Oktober 2025

Meisya Maulidina Saleha

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

- [Q.S Al-Insyirah: 5-6]



ABSTRAKSI

Nama : Meisya Maulidina Saleha

Nim : 202110110311154

Judul : Tinjauan Yuridis Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Perbandingan Indonesia dan Vietnam)

Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum

Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.

Demokrasi merupakan salah satu syarat untuk sebuah negara menjadi negara yang modern. Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan melalui pelaksanaan pemilu yang secara reguler dilaksanakan, tetapi juga bagaimana memastikan kelompok marginal dapat terlindungi dalam proses demokrasi elektoral (pemilu) maupun tata kehidupan demokrasi sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan dan mekanisme hukum yang diterapkan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dan Vietnam serta kendala yang dihadapi kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Analisis bahan hukum yang ditempuh untuk penelitian ini yakni secara deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk menganalisa objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kebijakan afirmatif diterapkan baik di Indonesia dan Vietnam, tetapi dengan menerapkan persentasi minimal yang berbeda, yakni Indonesia dengan 30% dan Vietnam dengan 35%. Dalam mekanisme pencalonan, Indonesia

dan Vietnam memiliki perbedaan. Indonesia, sebelum pencalonannya untuk memasuki kontestasi pemilu legislatif DPR RI, rekrutmen dan penjurangan dilaksanakan oleh partai politik. Sedangkan Vietnam, calon-calon dalam pemilihan umum tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Partai Komunis Vietnam sebelum dapat mencalonkan diri. Kendala yang dihadapi Indonesia dan Vietnam cukup serupa. Selain budaya patriarki, ada persamaan lain yakni belum ada peraturan tersendiri mengenai sanksi yang diberikan jika kuota kebijakan afirmatif yang diterapkan kedua negara tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengeluarkan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh KPU jika ada suatu partai politik yang tidak memenuhi peraturan kebijakan afirmatif 30% tersebut, beserta sanksi yang tegas jika partai politik tidak mematuhi.

Kata kunci : Keterwakilan Perempuan, Perbandingan Hukum, Pemilihan Legislatif.



ABSTRACT

Name : **Meisya Maulidina Saleha**

Student ID Number : **202110110311154**

Title : **Legal Review of Women's Representation in the Election of Members of the People's Representative Council (A Comparative Study of Indonesia and Vietnam)**

Supervisors : **Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum**

Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.

Democracy is one of the requirements for a country to become a modern nation. The quality of democracy is not only determined by the regular holding of elections, but also by how marginalized groups are protected in the electoral democratic process (elections) and in everyday democratic life. This study aims to compare the legal regulations and mechanisms applied regarding women's representation in the election of members of the People's Representative Council in Indonesia and Vietnam, as well as the challenges faced by both countries. This study uses a normative legal research method, which is a legal study conducted by examining literature (secondary data), using a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach. The legal materials analyzed for this research are descriptive qualitative, which is a method for analyzing objects that cannot be measured by numbers or other exact measurements. The results of the study show that affirmative action policies are implemented in both Indonesia and Vietnam, but with different minimum percentages, namely 30% in Indonesia and 35% in Vietnam. In the nomination mechanism, Indonesia and Vietnam

have differences. In Indonesia, before nomination for the legislative elections of the House of Representatives, recruitment and screening are carried out by political parties. In Vietnam, candidates in the general elections must obtain approval from the Communist Party of Vietnam before they can run for office. The challenges faced by Indonesia and Vietnam are quite similar. In addition to patriarchal culture, another similarity is the absence of specific regulations regarding sanctions if the affirmative action quotas implemented by both countries are not met. This study concludes that Indonesia needs to issue special regulations by the Election Commission (KPU) if a political party fails to comply with the 30% affirmative action policy, along with strict sanctions if the political party does not adhere to it.

Keywords: Women's Representation, Comparative Law, Legislative Elections.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat taufik, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Perbandingan Indonesia dan Vietnam)** sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Atas rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penulis senantiasa dipertemukan dengan orang-orang baik, hal-hal baik dan proses-proses yang baik. Dalam prosesnya, pengerjaan skripsi ini tidak mudah. Ada banyak waktu, tenaga dan pikiran yang membersamainya. Oleh karenanya, penulis sangat bersyukur atas adanya doa, bantuan, bimbingan dan dukungan dari banyak pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, ini menjadi kesempatan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, bimbingan serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtua tercinta, Ibu Hj. Vonika Rahmanniar Ganie, S.Psi., MM dan Bapak Syafri Syawal, A.Md, yang tentu menjadi

alasan penulis untuk tetap semangat dan tak menyerah dalam menjalani fase demi fase kehidupan. Terima kasih untuk doa-doa yang tak pernah putus, untuk semangat dan kepercayaan yang diberikan, untuk nasihat-nasihat, pengalaman hidup, dan semua bentuk dukungan yang penulis terima dari lahir hingga sekarang. Semuanya menjadi alasan untuk tetap tegak menjalani semua proses, dan menjadi penghangat hati yang selalu penulis rasakan. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran yang tiada pernah habis, serta pengorbanan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud kecil dari rasa terima kasih dan bakti yang tak sebanding dengan segala yang telah diberikan. Semoga ini menjadi kebahagiaan bagi kedua orangtua tercinta, sebagaimana penulis selalu berbahagia karena memiliki kalian.

5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dua adik tercinta, Aisha Putri Maghvira dan Queenza Rania Ayskaa. Karena kasih sayang dan kehadiran kalian lah penulis bisa terus berjalan dan tetap menjaga semangat, walau keadaan tak selalu mudah. Semoga kita bisa sukses bersama-sama.
6. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Almarhum Kai, Almarhumah Ninik, Almarhum Atuk dan Almarhumah Andung, atas segala kasih sayang, pengalaman hidup dan nasihat-nasihat.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar H. Dadang Syamsudin dan Hj. Maslani untuk segala dukungan penuh serta nasihat-nasihatnya.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan, Annisa', Atika, Kiki, Allysa dan Fika yang bukan hanya menjadi teman atau sahabat, tapi juga keluarga di perantauan. Kehidupan merantau yang dulu penulis khawatirkan, ternyata menjadi kebersamaan, candaan dan bantuan yang menguatkan selalu menguatkan penulis. Terima kasih kepada teman-teman penulis semasa magang yang juga seperti

keluarga di perantauan; Synthia, Welsa, Novi dan Afrijal, sehingga menyusun skripsi sembari magang menjadi proses yang banyak sekali kebersamaan dan pelajaran.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah kebersamai dan membantu penulis secara langsung dan tidak langsung selama ini. Penulis sangat bersyukur, dan semoga segala kebaikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.
10. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih untuk diri sendiri yang berani bertahan dalam perjalanan panjang fase demi fase kehidupan, memilih tidak menyerah di saat putus asa kerap kali dekat menyapa. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis sangat bersyukur bisa menjalani kehidupan dan sampai di titik ini. Semoga diri ini selalu ingat bahwa pencapaian menjadi langkah awal untuk terus belajar dan berkembang.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi membuat karya ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang membutuhkan, serta menjadi sumbangsih kecil dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum.

Malang, 18 September 2025

Yang menyatakan



Meisya Maulidina Saleha

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Kegunaan Penelitian	13
1.6 Metode Penelitian	13
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Unsur-Unsur Demokrasi	20
2.2 Teori Sistem Perwakilan	22
2.2.1 Pengertian Sistem Secara Umum	22
2.2.2 Sistem Perwakilan.....	23
2.3 Teori Sistem Pemilu.....	26

2.3.1	Pengertian Sistem Secara Umum	26
2.3.2	Mekanisme Sistem Pemilu dan Komponennya	27
2.4	Teori Kebijakan Afirmatif	30
2.4.1	Kebijakan dan Tujuan Kebijakan	30
2.4.2	Kebijakan Afirmatif	31
BAB III.....	34
PEMBAHASAN.....	34
3.1	Pengaturan dan Mekanisme Hukum yang Diterapkan Terkait Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dan Vietnam. 34	
3.2	Kendala yang Dihadapi Indonesia Terkait Penerapan Kebijakan Yuridis Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Dibandingkan dengan Vietnam.....	61
3.3	Indonesia dan Vietnam	79
BAB IV.....	82
PENUTUP.....	82
4.1	Kesimpulan.....	82
4.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Pengaturan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Anggota DPR di Indonesia dan Vietnam.	6
Tabel 1. 2 Skripsi Penelitian Terdahulu Mengenai Keterwakilan Perempuan di Parlemen.	8
Tabel 3. 1 Perbandingan Pengaturan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Anggota DPR di Indonesia dan Vietnam.	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2004 Berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.43



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atika, Ika. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Penerbit Haura Utama.
- Fatih, S. A. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Malang: UMMPress.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- Rasyid, F. A. (2020). *Model Perwakilan Politik di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Sistem Perwakilan Politik di Negara-Negara Lain)*. Bandung: CV. Sentra Publikasi Indonesia.
- Samosir, O. (2021). *Sistem Perwakilan Politik di Era Modern*, Jakarta: UKI Press.
- Suryabrata, S. (2018). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Susanto, A. (2017). *Sistem Informasi Akutansi: Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. Bandung: Lingga Jaya.
- Wiranggani, P. (2017). *Demokrasi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.

Jurnal

- Afifah, N. F. (2022). Perempuan Pengawal Demokrasi: Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepemiluan di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Volume 4, Nomor 2*, 159-170.

- Childs, S; Krook, M. (2008). Critical Mass Theory and Women's Political Representation. *Political Studies, Vol. 56*, 725-736.
- Faatuzahro, I. (2018). Politik Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia). *Skripsi: Universitas Negeri Semarang*, 1-76.
- Fadia Amellia Arawi, Haura Atthahara. (2022). Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 74-85.
- Fatoni, Y.N., Ahmad, A. D., Sipayung, J. B. (2024). Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik dan Konsekuensi dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 dan 2024, *Jurnal Politikom Indonesiana*, XI(1), 84-101.
- Fauziah, M. N; Rizki, M. Z.; Ramdani, R. (2023). Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vo. 49, No. 1*, 12-22.
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi, IX(2)*, 403-430.
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi I (I)*, 67-85.
- Irfandi; Husen, L; Muhdar, M. Z. Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif. *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, 1-14.
- Latip Kahpi. (2024). Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Faktor Penghambat dan Pendorong. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 1, 65-77.org

- Karmanis. (2022). Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen (Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, Kuba, Bolivia, Andorra, Meksiko, Spanyol, Swedia, Finlandia, Grenada dan Namibia). *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang, Volume 1 No. 22*, 1-15.
- Kosasih, A; Mahdi, I. (2016). *Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral*. Bengkulu: O Penerbit Vanda.
- Kusuma, A. S. H. (2023). Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara. *Harmonization, Vo. 1, No. 1*, 19-31.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, (2012), “*Modul Pelatihan Analisis Kebijakan.*”. Hal. 21-23.
- Luliana, K. A. Y; Dewi, K. W. A; Widiyanti, K. S. D; PR, Putu Amanda G. K. (2024). Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Perbandingan Antara Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup. *Setara, Volume. 5 No. 1*, 63-75.
- MS, Z. H., Muliawan, L. O., & Fatkhurrohman, M. (2020). Representasi Politik dalam Fenomena Konflik Goa Pindul di Kabupaten Gunung Kidul. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, V(1)*, 1-21.
- Nguyen B. A. (2019). Women’s Right to Political Participation in Vietnam: Challenge and Opportunities Set Forth by The 2013 Constitution. *Asian Constitutional Law: Recent Developments and Trends, Law Faculty, Binh Duong University*, 238-248.
- Novianty, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi, X(2)*, 332-354.
- Nurchaya, dkk. (2020). Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi Terhadap Perspektif *Muballigh Pekanbaru*). *Hukum Islam, XX(2)*, 203-218).

- Nurchahyo, A (2016). Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Agastya VI(1)*, 25-34.
- Putri, A. (2024). Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan di Partai Demokrat Pada Pemilu DPR RI 2024. *Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 1-11.
- Rahmatunnisa, M. (2016). Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik, I(2)*, 90-95.
- Sastra, B. Q; Rahmanita, A. A; Nursobah, S. S.; Mauladi, A; Rayhan, A. (2024). Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Vietnam. *Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 1-16.
- Sayuti, H. (2013). Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan). *Menara, XII(1)*, 41-47.
- Sibarani, R. E. H. (2022). Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan dan Kondisi Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia. *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*.
- Sulatsri. (2019). Sejarah Penerapan Affirmative Action dalam Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif. *Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 7, No. 1*, 105-130.
- Syafputri, E. (2014). Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. *Indonesian Journal of International Studies (IJIS) Vol.1, No.2*, 165-176.
- Tanjung, T. (2024). Mengenal Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vo. 2, No. 1*, 125-133.
- Thallah, H. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum, XVI(3)*, 413-422.

Tias, R. N; Nisrina, A. D; Destriputra, N; Putra, F. A. A; Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Politica*, Vol. 4, No. 2, 169-189.

Tran T. M. T. (2017). Institutional and Cultural Barriers to Women's Political Participation in Vietnam. *Institute for Family and Gender Studies, Vietnam Academy of Social Sciences*, No. 2 (178), 2017, 10-22.

Tran Thi Minh Thi, (2018). Women's Political Participation in Vietnam from Institutional, Gender, and Cultural Perspective. *Вьетнамские исследования. Серия 2. 2018, № 4*, 19-29.

Zamhuri, M. (2024). Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Legislatif Demi Terciptanya Keadilan Bangsa. *Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol. 1, 2024. 16-32.

Undang-Undang

Convention on the Elimination of Alls Forms of Discrimination Against Women.

Law No. 85/2015/QH13 on the Election of National Assembly Deputies.

Law No. 57/2014/QH13 On Organization of The National Assembly.

The Constitution of The Republic Socialist Vietnam. (2013).

The Law of Gender Equality Vietnam (2006).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Partai Politik.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Website

Armond, A. M. (2025). *“Urgensi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI.”*

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 10 Februari 2025. Diakses dari https://www.setneg.go.id/baca/index/urgensi_meningkatkan_keterwakilan_perempuan_di_dpr_ri pada 11 Februari 2025.

Inter-Parliamentary Union, *Monthly Ranking of Women in National Parliaments*. Diakses dari https://data.ipu.org/women-ranking/?date_year=2024&date_month=09 pada 25 Oktober 2024.

Monavia Ayu Rizaty (2023), DataIndonesia.Id, *Ini 8 Negara dengan Keterwakilan Perempuan Tertinggi di Parlemen*. Diakses melalui [Ini 8 Negara dengan Keterwakilan Perempuan Tertinggi di Parlemen \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id) pada 24 Oktober 2023.

Putra, N. (2024), Tempo. *“Formappi Kritik Ketiadaan Pimpinan Perempuan di Komisi VIII yang Membidangi Urusan Perempuan dan Anak.”* Tempo, 25 Oktober 2024. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/formappi-kritik-ketiadaan-pimpinan-perempuan-di->

[komisi-viii-yang-membidangi-urusan-perempuan-dan-anak-1159766](#) pada 11

Februari 2025.

Putri, N. (2025). Universitas Muhammadiyah Jakarta. *“Tantangan Perempuan dalam Arus Politik Perempuan Indonesia.”* Rubrik Opini Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2025. Diakses dari <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/#> pada 11 Oktober 2025.

Reliubun, I. (2025), Tempo. *“KPU Tak Beri Sanksi Parpol yang Belum Penuhi Syarat 30 Persen Keterwakilan Perempuan.”* Tempo, 9 Oktober 2024. Diakses dari <https://www.tempo.co/pemilu/kpu-tak-beri-sanksi-parpol-yang-belum-penuhi-syarat-30-persen-keterwakilan-perempuan-134697> pada 16 Februari 2025

UN Treaty Body Database, *Ratification Status for CEDAW: Vietnam.* Diakses dari tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CEDAW pada 25 Oktober 2024.

Vietnam Law & Legal Forum, *Roles, Performance and Contribution Representative during The 2016-21 Period and Implications for Gender Equity in Election Bodies in Vietnam.* Diakses dari [Roles, performance and contributions of women representatives during the 2016-21 period and implications for gender equity in elected bodies in Vietnam](#) pada 8 Januari 2025.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Meisya Maulidina Saleha

Nim : 202110110311154

Dengan Judul Skripsi :

" TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN VIETNAM)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 September 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum